

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta. 2001).
- Fairus, Adira. Mengenal Desa dan Pemerintah Desa. (Yogyakarta: Pixelindo. 2020).
- Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Edisi Revisi. (Depok: Rajawali Press. 2018).
- Isis Ikhwansyah, et al. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDes. (Bandung: Keni Media. 2020).
- Kamaroesid, Herry. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016).
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. Desa. (Jakarta: Balai Pustaka. 1984).
- Kurniawan, Boni. Desa Mandiri, Desa Membangun. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015).
- Norcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. (Jakarta: PT Grasindo. Edisi Revisi 2007).
- Sajida, Nazafarin. Kupas Tuntas Badan Usaha Milik Desa, (Yogyakarta: Pizelindo. 2020).
- Soehino. Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. (Jogyakarta: BPFE. 1991).
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet II. 2014).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003).
- Suparji. Pedoman Tata Kelola BUMDes. (Jakarta Selatan: UAI Press. 2019).
- W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2007).
- Widjaja, H. AW. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).
- _____. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2002).
- _____. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Ali, Bulat dan Utuh. (Jakarta: Raja Grafindo. 2010).
- _____. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh. (Jakarta: RajaGrafindo. 2005).

Jurnal

- Dekki Umamur R, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, *Jurnal Reformasi*, Vol 7, No 1, 2017, hlm 29
- Agus Surono, Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa oleh Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 6, No 3, 2017, hlm 460
- Agus Adhari dan Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridical*, Vol 9, No 1, 2017, hlm 14
- Niyonn Melatyugra, dkk, Penyulihan dan Konsultasi Aspek Hukum dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa, *Magistorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1, No 2, 2020, hlm 216
- Muchamad Zaenuri, Tata Kelembagaan dan Nomenklatur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal MODERAT*, Vol 7, No 1, 2021, hlm 117
- Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum pembentukan BUMDes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 3, 2013, hlm 367-368
- Ni Kadek Sinarwati, Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Desa, *Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 10, No 3, Tahun 2021, hlm. 512.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelokaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoaman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten.Kota dan Kalurahan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Desa Margokaton Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Margokaton

Internet

<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/4126/presiden-jokowi-minta-bumn-dan-swasta-libatkan-bumdesa> diakses pada 21 Februari 2021 pada pukul 14.43 WIB

Wawancara

Astuti, Lucia Ari. Wawancara. Badan Usaha Milik Desa Katon Margo Sembada Margokaton. (Sleman, 25 Januari 2022, pukul 13.00 WIB)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Melakukan Kegiatan Penelitian